

Perubahan Peta Politik di DKI Jakarta Setelah Pemilu 1987

Subagyo PARTODIHARDJO*

Salah satu perwujudan dari proses penyaluran aspirasi rakyat yang paling populer di negara-negara demokrasi adalah proses pemilihan umum (Pemilu). Di Indonesia Pemilu tampaknya telah makin menjadi budaya politik. Rata-rata lima tahun sekali sejak tahun 1971 hingga tahun 1987 ini rakyat Indonesia berkesempatan untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses politik nasional. Oleh karena itu, pengamatan atas hasil-hasil Pemilu memberi gambaran mengenai perkembangan dan dinamika kehendak serta aspirasi rakyat.

Pengamatan tersebut tampaknya menjadi lebih nyata apabila dipusatkan pada kelompok besar masyarakat yang dinamis seperti masyarakat DKI Jakarta. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, DKI Jakarta memiliki beberapa karakteristik tertentu. *Pertama*, sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta mempunyai jaringan komunikasi massa yang relatif maju. Karena itu, masyarakatnya dapat cepat mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, dan juga perilaku aparat pemerintah, perkembangan situasi nasional, regional maupun internasional. Sebagai konsekuensi dari pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat aktivitas sosial-politik. Setidak-tidaknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ketiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) berkedudukan di Jakarta, sehingga bagi ketiga OPP tersebut Jakarta merupakan ajang perebutan "gengsi" perolehan suara dalam setiap pemilihan umum.

Kedua, DKI Jakarta merupakan pusat pendidikan. Setidak-tidaknya jumlah lembaga pendidikan menengah ke atas serta lembaga-lembaga penelitian lebih banyak daripada yang ada di daerah-daerah lain. Boleh dikatakan, masyarakat Jakarta rata-rata berpendidikan menengah ke atas. Dengan kondisi semacam ini, perilaku penduduk Jakarta pada umumnya cenderung

*Anggota Kelompok Diskusi 17845, Jakarta.

dinamis, kreatif dan kritis/korektif. *Ketiga*, tingkat kepadatan penduduk di Jakarta tinggi. Sementara itu, rata-rata kondisi sosio-ekonomi masyarakatnya rendah, sehingga masalah-masalah sosial-ekonomi seperti kesenjangan dan kecemburuan sosial, pengangguran dan semacamnya secara potensial sangat mudah terjadi. Di samping itu, perkembangan pembangunan fisik yang sangat cepat seringkali menimbulkan masalah-masalah *law-enforcement*, hukum dan keadilan yang bisa menjadi sangat menonjol.

Keempat, kehidupan keagamaan masyarakat Jakarta relatif kuat seperti terlihat dari banyaknya fasilitas-fasilitas keagamaan, dan mungkin disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, agama menjadi tempat untuk mendapatkan suasana "kesejukan dan ketenangan" hati. Karakteristik ini juga tampak dalam hasil-hasil Pemilu pada masa-masa yang lalu. Kekuatan sosial-politik peserta Pemilu yang secara langsung membawakan atau mencerminkan aspirasi keagamaan secara menonjol memperoleh dukungan suara yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang lain.

Karakteristik lain yang tampaknya berkaitan langsung dengan proses Pemilu 1987 adalah struktur kependudukan yang relatif muda. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah pemilih muda pada Pemilu kali ini. Jumlah pemilih terdaftar adalah 4,3 juta. 75% dari jumlah itu adalah pemilih dengan rata-rata umur dibawah 40 tahun; dan dari persentase pemilih muda itu sebanyak 30% adalah pemilih pemula; yakni orang-orang yang baru untuk pertamakali menggunakan hak pilih dalam Pemilu yang rata-rata berumur 22 tahun ke bawah.

Persoalan yang kiranya pantas diungkap adalah apakah karakteristik masyarakat Jakarta itu berpengaruh pada sikap memilih masyarakat dalam pemilihan umum. Untuk menjawab persoalan pokok ini, pengamatan akan dipusatkan pada proses kampanye Pemilu, perubahan perolehan suara masing-masing OPP pada wilayah teritorial DKI Jakarta, wilayah kota, kecamatan dan kelurahan serta pada beberapa "tempat pemungutan suara" (TPS) dengan karakteristik tertentu yang menonjol pada Pemilu 1987 ini.

KAMPANYE DAN PEROLEHAN SUARA

Salah satu aspek penting dalam Pemilu adalah proses kampanye Pemilu. Kampanye Pemilu, tanpa alasan-alasan khusus, biasanya berpengaruh pada besar-kecilnya perolehan suara masing-masing kontestan Pemilu. Namun secara teoritis, kampanye Pemilu di Indonesia berpengaruh sangat kecil atas hasil-hasil Pemilu masing-masing OPP. Meriahnya kampanye Pemilu dari salah satu OPP tidak selalu berarti besarnya dukungan rakyat pada organisasi kekuatan sosial-politik tersebut.

Kampanye Pemilu 1987 di Jakarta berlangsung dengan menarik. Ketiga OPP secara mufakat mengatur kampanye Pemilu mereka secara bergiliran. Masing-masing OPP mendapat kesempatan 8 kali kampanye selama 24 hari masa kampanye resmi. Pengaturan serupa ini pada dasarnya sangat menguntungkan banyak pihak dan memperkecil kemungkinan terjadinya benturan-benturan fisik antar-massa yang berkampanye. Selain menciptakan penghematan biaya, kampanye bergilir ini juga membantu membangkitkan suasana kompetisi yang sehat di antara masing-masing OPP dan melahirkan pula kreativitas baru.

Pada putaran-putaran kampanye pertama sampai dengan kelima, ketika kampanye dilaksanakan pada tingkat kecamatan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tampak mengalami kesulitan dalam mengerahkan dan mengkonsolidasi massa mereka. Di beberapa kesempatan dan lokasi kampanye, PPP dan PDI membatalkan acara kampanye rapat umumnya dan kemudian mereka ubah menjadi kampanye dalam bentuk pawai-pawai kecil. Kesulitan ini mungkin sekali disebabkan oleh kurang matangnya persiapan mereka dalam menggalang massa, yang kemudian diatasi dengan mendatangkan massa dari wilayah kecamatan lain. Jika memang terjadi hal semacam itu, jelas OPP yang bersangkutan telah melanggar kesepakatan bersama tentang pengaturan dan tata-laksana kampanye di DKI Jakarta. Dalam kaitan ini, Golongan Karya (Golkar), harus diakui, merupakan satu-satunya OPP yang paling siap dalam segala hal. Di samping mempunyai sejumlah Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes), Golkar juga telah mempersiapkan kantong-kantong massa Organisasi Massa Fungsional (Orsosmasinal) Keluarga Besar Golkar, Korpri dan sebagainya, sehingga kampanye-kampanye Golkar selalu terlihat dibanjiri oleh ribuan massa baik sejak masa awal maupun masa akhir kampanye Pemilu.

Pada putaran-putaran kampanye selanjutnya, yang diselenggarakan pada tingkat walikota (putaran 6 dan 7) dan tingkat DKI (putaran 8), mulai terlihat perubahan suasana dalam kampanye masing-masing kontestan. Kampanye PPP tampak semakin tegar, sementara kampanye PDI terlihat semakin bergairah dan meriah. Namun berdasarkan pengamatan lapangan, antara massa PPP dan PDI tampak terjalin semacam -- kalau boleh dikatakan -- *joint operation*. Disengaja atau tidak, banyak massa yang berkampanye untuk PPP pada hari lain juga berkampanye untuk PDI. Hal semacam ini berlangsung terutama pada masyarakat di daerah-daerah seperti Klender, Koja, Kemayoran, Jembatan Besi, Tebet dan beberapa daerah di wilayah Jakarta lainnya. Penggabungan massa semacam itu pada saatnya sering menimbulkan kesalahan perkiraan jumlah pendukung riil masing-masing OPP itu sendiri.

Kampanye di Jakarta, dari putaran ke putaran, semakin semarak namun tetap tertib. Penegakan disiplin lalu-lintas yang akhir-akhir ini diterapkan oleh pemerintah dengan pelbagai operasinya itu oleh sebagian masyarakat diang-

gap sebagai belenggu yang merampas kebebasannya, karena kesadaran tertib lalu-lintas memang masih rendah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang lebih ketat oleh Golkar dirasakan kurang memenuhi selera muda. Bagi sebagian warga kota, hari kampanye seolah-olah mengundang kerinduan tersendiri. Orang-orang muda memanfaatkan hari kampanye sebagai hari untuk berpetualang di jalanan. Mereka lebih senang mengikuti pawai dan rally kampanye daripada mendengarkan pidato kampanye. Itulah sebabnya, kampanye yang sebelumnya diperkirakan akan sepi ternyata berubah menjadi semakin dinamis dan semarak, ditambah lagi munculnya isu-isu menarik yang mampu menghangatkan suasana.

Parpol, khususnya PDI, terkesan, entah dirancang atau tidak disengaja, membebaskan peserta kampanyenya dari aturan-aturan yang ketat, sehingga pawai-pawai kampanye PDI, meskipun berlangsung semrawut namun meriah dan bergairah; dan oleh karena itu menarik perhatian banyak orang. Pada putaran-putaran akhir kampanye, PDI semakin kreatif dengan didukung oleh hadirnya aneka spanduk, tanda-gambar, poster dan alat-alat peraga lainnya yang terbuat dari bahan seadanya dengan teknik pembuatan "asal-jadi." Namun justru karena sifatnya yang "swasembada" ini kampanye PDI dirasakan lebih "merakyat" daripada kampanye Golkar ataupun PPP.

Semakin menawanannya kampanye PDI menunjukkan bahwa kekuatan sosial-politik ini tidak mengesankan adanya kekurangan pendanaan, bahkan seolah-olah mempunyai dukungan fasilitas dan sumber-dana yang memadai untuk mendukung kampanye sebesar di Jakarta Raya. Suasana kebebasan yang telah diciptakan PDI mungkin merupakan faktor utama ikut sertanya banyak warga masyarakat, meskipun mereka anggota OPP lain, khususnya generasi muda. Bahkan kampanye PDI juga diikuti oleh anak-anak usia di bawah umur memilih. Hasilnya, kampanye PDI pada putaran terakhir menjadi sangat besar dan menakjubkan. Mungkin hanya PDI-lah yang secara langsung memperoleh keuntungan dari proses kampanyenya dalam perolehan suaranya.

Kampanye PDI yang mengesankan itu pada dasarnya telah mengecilkan ketegaran kampanye PPP. Meskipun tetap tampil secara tegar, bahkan kadang-kadang terkesan "beringas," kampanye PPP berlangsung lebih tertib daripada selama Pemilu 1982 di Jakarta. Tampilnya PPP pada Pemilu 1982 yang dianggap mampu menampung gejolak dan aspirasi generasi muda dan *protest votes* ternyata telah digantikan kedudukannya oleh PDI pada kampanye Pemilu 1987 ini. Salah satu sebab utamanya, kemungkinan adalah berlanjutnya konflik internal pribadi tokoh-tokoh dan pimpinan PPP, serta tidak terikatnya lagi organisasi keagamaan NU dalam jajaran keluarga PPP. Dalam kampanye kali ini, PPP tampak kehilangan pegangan lama, sementara pegangan baru yang cukup andal untuk menarik massa belum diperoleh.

Kampanye Golkar, jika dibandingkan dengan kampanye dua OPP yang lain, berlangsung lebih tertib, namun tampak kurang meriah dan bergairah. Salah satu sebabnya adalah diterapkannya aturan yang ketat bagi massa yang berkampanye untuk kekuatan sosial-politik terbesar ini. Misalnya, Golkar mewajibkan para peserta kampanyenya untuk patuh pada aturan-aturan lalu-lintas, mengenakan helm pengaman, membatasi kecepatan kendaraan, membatasi jumlah penumpang kendaraan dan lain sebagainya. Di samping itu, tampak pula bahwa peserta kampanye Golkar sebagian besar terdiri dari orang-orang yang secara ekonomis telah "mapan" dan biasanya mempunyai kecenderungan untuk bertindak "hati-hati." Namun di bawah permukaan sebenarnya Golkar telah menyimpan massa pendukung lebih banyak daripada kedua OPP yang lain, yang biasa disebut sebagai *silent voters*. Silent voters ini secara pasti telah menentukan pilihannya pada Golkar; mereka pada umumnya tidak berniat turut-serta dalam huru-hura kampanye. Secara tentatif, dapat dikatakan bahwa tanpa kampanye Pemilu pun Golkar sebenarnya telah mengantongi kemenangan. Hanya saja, Golkar mengalami tantangan yang diseruakkan oleh PDI khususnya pada kampanye putaran terakhirnya.

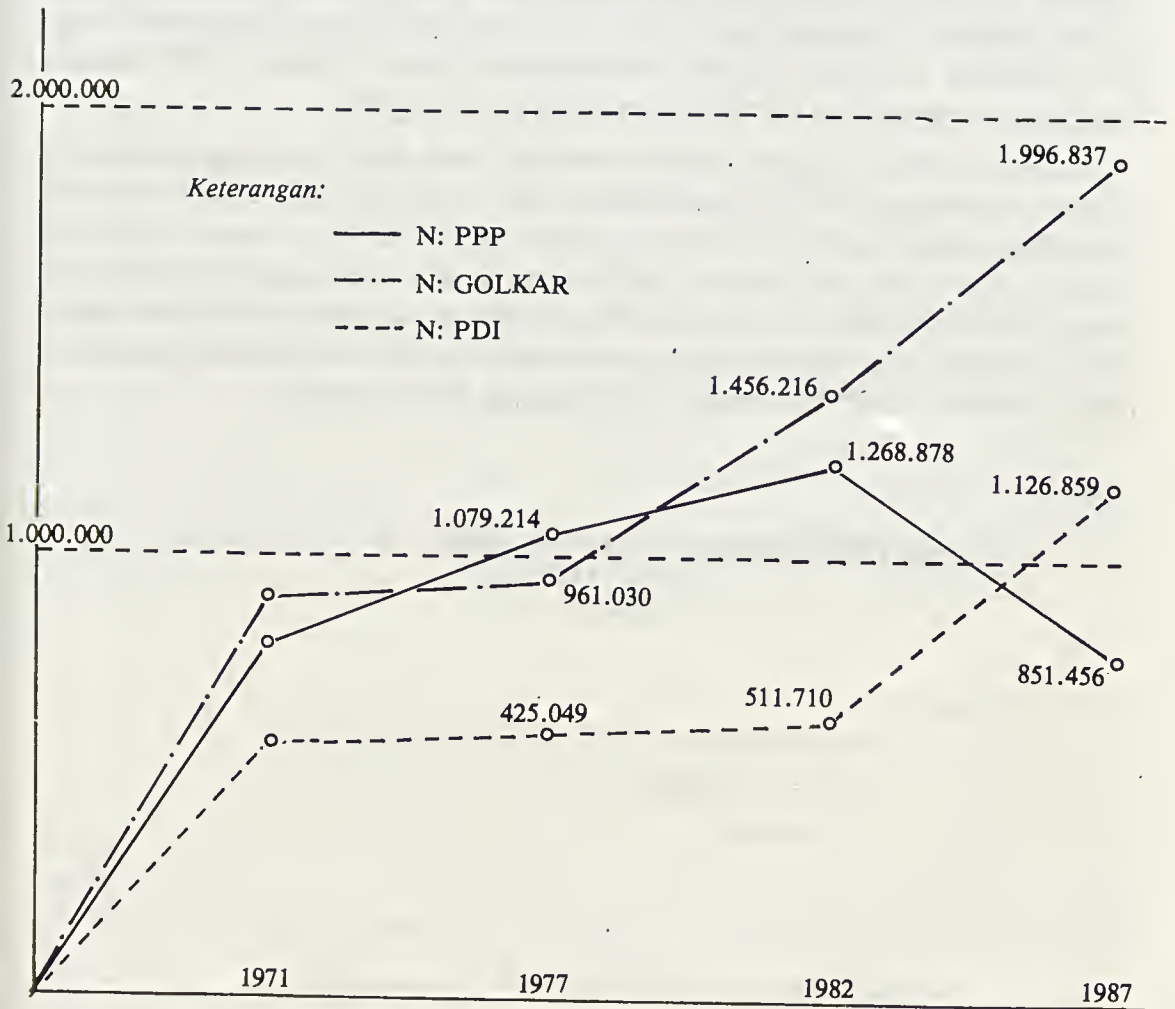
PEROLEHAN SUARA

Konsolidasi organisasi dan kaderisasi di lingkungan PDI pada saat menjelang Pemilu tampak sangat minim, setidaknya-tidaknya tidak seintensif Golkar. Demikian pula, pembinaan dan penggalangan massanya juga tidak sehebat Golkar, bahkan intensitasnya masih kalah dengan PPP yang dilakukan lewat pengajian-pengajian. Meskipun demikian dengan tampilnya PDI baru hasil Kongres III 1986, banyak orang menduga PDI akan mengalami kenaikan dalam perolehan suara Pemilu 1987, tetapi tidak akan dapat melampaui PPP. Namun kenyataan menunjukkan lain. Setelah melalui proses kampanye yang merangsang dan menggairahkan, perolehan suara PDI boleh dikatakan mengejutkan. Ia berhasil melampaui perolehan suara PPP. Secara nominal perolehan suara PDI pada Pemilu 1987 melonjak dua kali lipat dari perolehan-nya pada Pemilu sebelumnya, yakni sebesar 1.126.859 suara.

Sebaliknya, PPP mengalami penurunan perolehan suara secara drastis jika dibandingkan dengan perolehan suaranya pada Pemilu 1982, yakni hanya sebesar 851.456 suara. Sementara Golkar mengalami kenaikan yang konstan dari Pemilu ke Pemilu. Pada Pemilu 1987 ini Golkar tetap unggul dalam perolehan suara dari kedua OPP yang lain, yakni sebesar 1.996.837. Secara demikian, hasil Pemilu 1987 di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar warga Jakarta mempercayakan wakil-wakilnya terutama kepada Golkar, yang kedua kepada PDI dan yang terakhir kepada PPP. Gambar 1 melukiskan bagaimana perkembangan dan perubahan kepercayaan rakyat pada OPP dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1987.

Gambar 1

GRAFIK PERKEMBANGAN PEMILIH
 PEMILU 1971-1977-1982-1987
 DI DKI JAKARTA
 (Dalam Nominal)



Sumber: 1. Panitia Pemilihan Indonesia, *Perhitungan Suara bagi OPP dan Penempatan Wakil yang Diperoleh Organisasi untuk Daerah Tingkat II di Tiap Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 1987*.
 2. *Suara Karya*, 16 Juni 1982.

Perubahan persentase perolehan suara masing-masing OPP di Jakarta ternyata tidak identik dengan grafik perubahan perolehan suara nominal. Pada tahun 1977, PPP memperoleh persentase perolehan suara terbesar, yaitu 43,8%, namun pada Pemilu berikutnya (1982) persentase perolehan suara tersebut merosot, sehingga hanya mencapai 38% saja. Pada Pemilu 1987, PPP harus menerima kenyataan bahwa ketegarannya ternyata tidak didukung oleh persentase dukungan dalam perolehan suara yang sebanding. Persentase perolehan suaranya semakin menurun lagi yakni hanya 21,83%.

Perkembangan yang dialami PPP ini kebalikan dengan kecenderungan yang dialami baik oleh Golkar maupun PDI. Golkar, setelah menang dalam Pemilu 1971 dengan persentase perolehan suara 46%, pada Pemilu 1977 perolehan suara nominalnya naik, namun persentasenya turun menjadi 38,48%, sehingga berada di bawah urutan PPP. Pada Pemilu 1982 tampaknya Golkar mampu meningkatkan persentase perolehan suara menjadi 44%. Tingkat kenaikan ini masih dapat dipertahankan pada Pemilu 1987 dengan memperoleh persentase perolehan suara sebesar 50,56%.

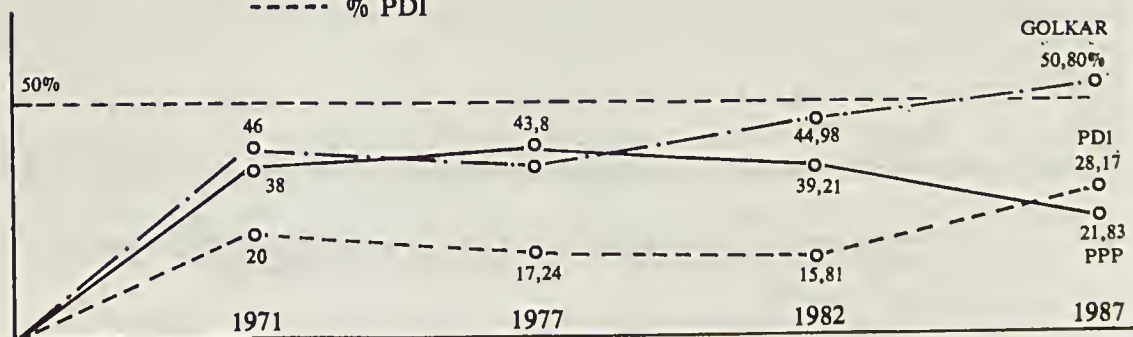
Julukan sebagai partai politik terkecil bagi PDI memang beralasan. Karena dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1982, persentase perolehan suara PDI mengalami penurunan yang konstan, meskipun perolehan suara nominalnya meningkat. Namun pada Pemilu 1987 secara spektakuler persentase perolehan suara PDI meningkat menjadi 28,17%, melebihi persentase perolehan suara PPP. Gambar 2 memperlihatkan turun-naiknya persentase perolehan suara masing-masing OPP dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1987.

Gambar 2

GRAFIK PERKEMBANGAN PEMILIH PEMILU 1971-1977-1982-1987
DI DKI JAKARTA
(Dalam %)

Keterangan:

- % PPP
- · - % GOLKAR
- - - % PDI



Sumber: *Idem.*, Gambar 1.

TINGKAT WILAYAH KOTA DAN KECAMATAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara administratif terbagi dalam 5 (lima) wilayah kota, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di dalam 5 wilayah kota tersebut terdapat 30 (tiga

puluh) kecamatan. Pengamatan perolehan suara Pemilu masing-masing OPP di tingkat wilayah kota dan kecamatan pada dasarnya menunjukkan pada daerah/wilayah mana dan atau berapa banyak wilayah masing-masing kekuatan sosial-politik itu memperoleh dukungan suara pemilih lebih banyak daripada kekuatan sosial-politik yang lain. Namun hal ini tidak berarti bahwa kemenangan salah satu OPP di suatu wilayah kota berarti OPP tersebut unggul di seluruh wilayah kecamatan yang berada dalam areal kota tersebut.

Pada Pemilu 1977, Golkar ternyata hanya mampu memperoleh keunggulan dalam perolehan suara dari dua OPP yang lain di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. PPP meraih keunggulan di 3 wilayah kota yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dalam kaitan ini, PDI tak satu pun pernah unggul di daerah wilayah kota tersebut. Pada Pemilu 1982 terjadi perubahan. Golkar mampu memperoleh keunggulan di empat wilayah kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. PPP hanya mampu mempertahankan keunggulan di wilayah Jakarta Selatan. PDI belum dapat meraih kemenangan atas dua OPP yang lain di kelima wilayah kota ini. Perubahan terjadi lagi pada Pemilu 1987. Golkar secara sempurna berhasil menguasai seluruh wilayah kota, dan secara tak terduga PDI berhasil mengungguli PPP. Tabel 1 menunjukkan perubahan urutan keunggulan OPP dari Pemilu 1977 hingga Pemilu 1987 di lima wilayah kota DKI Jakarta.

Tabel 1

URUTAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT WILAYAH KOTA
(Pemilu 1977, 1982 dan 1987 di DKI Jakarta)

WILAYAH	PEMILU 1977			PEMILU 1982			PEMILU 1987		
	URUTAN OPP			URUTAN OPP			URUTAN OPP		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Jakarta Pusat	GOLKAR	PPP	PDI	GOLKAR	PPP	PDI	GOLKAR	PDI	PPP
Jakarta Utara	PPP	GOLKAR	PDI	GOLKAR	PPP	PDI	GOLKAR	PDI	PPP
Jakarta Barat	GOLKAR	PPP	PDI	GOLKAR	PPP	PDI	GOLKAR	PDI	PPP
Jakarta Selatan	PPP	GOLKAR	PDI	PPP	GOLKAR	PDI	GOLKAR	PDI	PPP
Jakarta Timur	PPP	GOLKAR	PDI	GOLKAR	PPP	PDI	GOLKAR	PDI	PPP

Sumber: 1. Panitia Pemilihan Indonesia, *Perhitungan Suara bagi OPP dan Penempatan Wakil yang Diperoleh Organisasi untuk Daerah Tingkat II di Tiap Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 1987.*

2. *Suara Karya*, 16 Juni 1982.

Peta politik pada tingkat kecamatan tidak jauh berbeda dari yang tercermin pada tingkat wilayah kota. Pada Pemilu 1982, Golkar berhasil menguasai 19 kecamatan, sementara PPP memegang 11 kecamatan. PDI hampir tidak

pernah unggul atas kedua OPP yang lain di kecamatan mana pun juga. Keadaan ini berubah pada Pemilu 1987. Golkar secara menakjubkan menguasai seluruh kecamatan yang ada di lima wilayah kota Jakarta. Sementara itu, di beberapa wilayah kecamatan PDI berhasil mengungguli perolehan suara PPP meskipun masih tetap berada di bawah jumlah perolehan suara Golkar (Tabel 2).

Tabel 2

**URUTAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN
PADA PEMILU 1982 DAN 1987 DI DKI JAKARTA***

No. Kecamatan	1982			1987		
	1	2	3	1	2	3
1. Senen	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
2. Cempaka Putih	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
3. Gambir	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
4. Sawah Besar	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
5. Kemayoran	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
6. Menteng	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
7. Tanah Abang	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PPP	PDI
8. Kep. Seribu	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PPP	PDI
9. Penjaringan	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
10. Tanjung Priok	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
11. Koja	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
12. Cilincing	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
13. Cengkareng	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
14. Grogol Petamburan	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
15. Tambora	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
16. Taman Sari	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
17. Kebon Jeruk	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
18. Tebet	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
19. Setia Budi	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
20. Mampang	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PPP	PDI
21. Pasar Minggu	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PPP	PDI
22. Kebayoran Lama	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
23. Kebayoran Baru	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
24. Cilandak	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
25. Cakung	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PPP	PDI
26. Pulo Gadung	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
27. Kramatjati	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
28. Matraman	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PDI	PPP
29. Pasar Rebo	Golkar	PPP	PDI	Golkar	PDI	PPP
30. Jatinegara	PPP	Golkar	PDI	Golkar	PPP	PDI

Kesimpulan: 1. Sebelas (11) kecamatan basis PPP pada Pemilu 1982 berubah menjadi basis Golkar pada Pemilu 1987;
2. PDI secara merata mengambil-alih posisi PPP pada urutan kedua (2), kecuali di kecamatan Tanah Abang, Kep. Seribu, Mampang, Pasar Minggu, Cakung, Jatinegara;
3. PDI memperoleh kenaikan nominal jumlah pemilih rata-rata lebih banyak daripada Golkar di tiap kecamatan, kecuali 8 kecamatan seperti: Jatinegara, Kramatjati, Pasar Minggu, Setia Budi, Kebon Jeruk, Kep. Seribu, Tanah Abang, Gambir.

*Diolah berdasarkan pada hasil pengamatan lapangan.

Gambaran kuantitatif tentang perubahan peta politik atas dasar hasil Pemilu tersebut sebenarnya menunjukkan telah terjadinya perubahan pilihan warga masyarakat kota Jakarta. Bila identifikasi dari ke lima wilayah kota DKI tersebut menggambarkan karakteristik khusus masyarakat pada masing-masing wilayah kota, maka sebenarnya pandangan masyarakat dengan karakteristik khusus itu juga telah berubah dari Pemilu ke Pemilu. Warga masyarakat Jakarta Utara, misalnya, selalu diidentifikasi sebagai masyarakat yang mempunyai karakteristik ekstrovet, selalu protes terhadap keadaan, tetapi taat serta patuh pada agama.

Dalam Pemilu 1977, terlihat bahwa bagian besar warga masyarakat Jakarta Utara menentukan pilihannya untuk PPP. PPP pada Pemilu 1977 ini memang mencerminkan diri sebagai partai yang menyalurkan aspirasi agama dan menampung segala macam bentuk protes terhadap keadaan dan situasi yang berlangsung saat itu. Keadaan ini berubah pada Pemilu 1982 dan kemudian dalam keadaan tetap pada Pemilu 1987. Bila karakteristik masyarakat Jakarta Utara tetap, maka hal itu berarti telah terjadi perubahan pada citra Golkar sebagai kekuatan sosial-politik. Sekurang-kurangnya Golkar telah menampilkan diri sebagai kekuatan sosial-politik pengganti PPP bagi bagian besar masyarakat Jakarta Utara.

Sikap memilih masyarakat Jakarta Utara tidak berubah. Namun apabila karakteristik warga masyarakat Jakarta berubah, sesuai dengan proses pembangunan yang berlangsung pada masyarakat itu, sementara citra kekuatan politik peserta Pemilu tidak berubah, maka boleh dikatakan sikap memilih masyarakat Jakarta Utara telah berubah. Sekurang-kurangnya mereka melihat Golkar sebagai kekuatan sosial-politik yang mampu merubah nasibnya menjadi lebih baik. Tentu dalam kaitan ini pengamatan sosiologis secara lebih cermat perlu dilakukan khususnya terhadap pola sikap memilih masyarakat pada masing-masing wilayah kota yang mempunyai karakteristik khusus tersebut.

BASIS-BASIS KEKUATAN

Perubahan peta politik akan semakin menarik untuk diamati pada tingkat kelompok-kelompok masyarakat yang mencerminkan kekuatan riil masing-masing OPP. Dalam kaitan ini kekuatan riil pendukung OPP terlihat pada keunggulan perolehan suara pada tingkat kelurahan. Pada tingkat ini bisa diidentifikasi daerah-daerah yang menjadi basis kekuatan masing-masing OPP. Suatu kelurahan dikatakan sebagai daerah *basis* apabila jumlah perolehan suara suatu OPP lebih besar dari jumlah perolehan suara kedua OPP yang lain. Dalam hal ini, persentase yang diraih OPP pada daerah basis itu mencapai lebih dari 50%. Sementara itu, suatu OPP dinyatakan memperoleh

kemenangan pada suatu kelurahan apabila jumlah perolehan suaranya lebih banyak dari masing-masing jumlah perolehan suara kedua OPP yang lain. Persentase perolehan suara OPP yang memperoleh kemenangan itu, meskipun di bawah 50%, tetap lebih besar daripada persentase kedua OPP yang lain. Suatu *kekalahan* dialami oleh OPP apabila jumlah perolehan suaranya lebih kecil dari jumlah perolehan salah satu OPP yang lain dan/atau lebih kecil dari jumlah kedua OPP yang lain.

DKI Jakarta mempunyai 236 kelurahan (jumlah ini dianggap tetap sejak Pemilu 1982 hingga Pemilu 1987). Dari jumlah itu, pada Pemilu 1982 Golkar berhasil unggul di 125 kelurahan, sementara PPP unggul di 111 kelurahan. PDI samasekali tidak mencapai keunggulan di satu kelurahan pun. Pada Pemilu 1987, Golkar berhasil meraih keunggulan di 211 kelurahan, sementara PPP hanya mampu mempertahankan keunggulannya di 10 kelurahan. Dan PDI berhasil mencapai keunggulan di 22 kelurahan.

Berdasarkan pengamatan ini, terlihat bahwa basis PPP pada umumnya rontok dalam Pemilu 1987 dan tidak berhasil membangun satu pun daerah basis baru. Sementara itu jumlah basis Golkar bertambah di 39 kelurahan dan basis lama tampak semakin kokoh. Dari 69 daerah basis yang dimiliki Golkar pada Pemilu 1982 berubah menjadi 108 basis pada Pemilu 1987. Sedangkan PPP mengalami perubahan yang sangat dramatis, yakni dari 48 basis yang dimiliki pada Pemilu 1982 menjadi hanya 1 daerah basis pada Pemilu 1987. Meskipun berhasil menang atas PPP di beberapa kelurahan, PDI belum berhasil membentuk satu pun daerah basis (lihat Tabel 3).

Tabel 3

JUMLAH KELURAHAN BASIS PPP, GOLKAR, PDI
PADA PEMILU 1982 DAN 1987 DI DKI JAKARTA*

WILAYAH	PPP		GOLKAR		PDI	
	1982	1987	1982	1987	1982	1987
Jakarta Pusat	8	0	12	21	0	0
Jakarta Utara	5	0	8	15	0	0
Jakarta Barat	5	0	26	34	0	0
Jakarta Selatan	17	1	7	19	0	0
Jakarta Timur	13	0	16	19	0	0
DKI Jakarta	48	1	69	108	0	0

Catatan: Basis adalah kelurahan di mana suatu OPP memperoleh jumlah suara di atas 50%, atau di atas jumlah 2 OPP lain.

*Diolah berdasarkan pada analisa pengamatan lapangan.

Perincian secara lebih khusus menunjukkan gambaran perubahan secara lebih jelas. Daerah-daerah basis PPP pada Pemilu 1982 ternyata berubah menjadi daerah kemenangan Golkar atau PDI. Demikian pula daerah-daerah kemenangan PPP pada Pemilu 1982 berubah menjadi daerah basis dan/atau kemenangan Golkar ataupun daerah kemenangan PDI. Sementara itu, daerah-daerah kekalahan PPP pada Pemilu 1982 berubah menjadi daerah basis dan/atau daerah kemenangan Golkar ataupun daerah kemenangan PDI pada Pemilu 1987.

Keadaan yang dialami Golkar sangat jauh berbeda dari yang menimpa PPP. Banyak daerah-daerah basis Golkar pada Pemilu 1982 dapat tetap dipertahankan pada Pemilu 1987. Sementara itu beberapa daerah kemenangan Golkar dapat berubah menjadi daerah basis, dan semua daerah kekalahan Golkar pada Pemilu 1982 mampu meningkat menjadi daerah kemenangan Golkar. PDI mengalami kemenangan lebih banyak dari PPP. Banyak daerah-daerah kekalahan PDI pada Pemilu 1982 mampu diubah dan ditingkatkan menjadi daerah kemenangan PDI (lihat Tabel 4).

Tabel 4

**JUMLAH KELURAHAN BASIS-MENANG-KALAH
MASING-MASING OPP PADA PEMILU 1982 DAN 1987 DI DKI JAKARTA***

KUALIFIKASI OPP	BASIS			MENANG			KALAH		
	1982	1987	Perubahan	1982	1987	Perubahan	1982	1987	Perubahan
PPP	48	1	-47	110	12	-98	126	224	+98
Golkar	69	108	+39	125	111	-14	111	32	-79
PDI	0	0	0	0	20	+20	236	216	-20

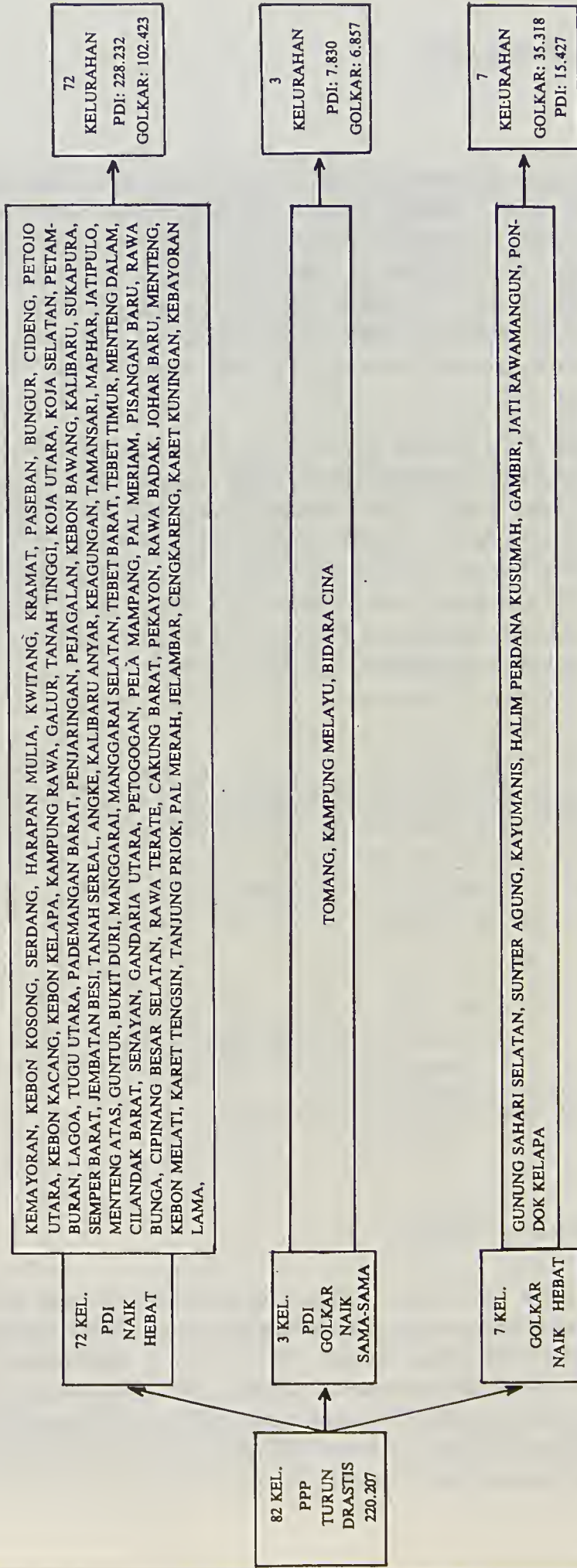
Catatan: Jumlah kelurahan dianggap tetap 236.

*Diolah berdasarkan pada analisa hasil pengamatan lapangan.

PERGESERAN PEMILIH

PPP secara keseluruhan mengalami kemerosotan yang relatif besar. Bila dibandingkan dengan jumlah perolehan suara dalam Pemilu 1982, PPP kehilangan jumlah suara sebesar 384.763 suara atau minus 22%. Padahal jumlah pemilih di DKI bertambah sebesar 1.400.000 orang. Secara demikian, sejumlah besar pemilih PPP pada Pemilu 1982 telah mengalihkan pilihannya pada salah satu di antara kedua OPP yang lain dan/atau tidak menentukan pilihan samasekali pada Pemilu 1987.

PERGESERAN SUARA PPP DALAM PEMILU 1987 DI DKI JAKARTA



Catatan: PPP turun drastis pada 82 kelurahan. Pada kelurahan tersebut ternyata:

1. Dikuti oleh kenaikan PDI secara menyolok pada 72 kelurahan: Selisih kenaikan 125.809 suara.
2. Dikuti oleh kenaikan PDI dan Golkar seimbang: 3 kelurahan: Selisih kenaikan 973 suara.
3. Dikuti oleh kenaikan Golkar secara menyolok: 7 kelurahan: Selisih kenaikan 19.891 suara.

Memang sulit untuk menentukan secara pasti "larinya" pemilih PPP itu pada Pemilu 1987. Secara formal, banyak tokoh-tokoh PPP yang karena konflik dengan pimpinan-pimpinan PPP yang lain menjelang Pemilu 1987 menyatakan diri meninggalkan PPP dan pindah ke Golkar. Tampak pula bahwa Golkar banyak memanfaatkan peluang dari kondisi internal PPP. Namun demikian, kenyataan tersebut belum menjamin bahwa banyak warga (bekas) pendukung PPP yang memilih Golkar. Dari peta politik teritorial terlihat bahwa PPP mengalami kemerosotan di 82 kelurahan secara drastis. Kemerosotan PPP tentu saja diikuti oleh naiknya perolehan suara dari dua OPP yang lain. Di antara 82 kelurahan itu, Golkar mengalami kenaikan besar di 7 kelurahan, PDI di 72 kelurahan dan masing-masing mengalami kenaikan yang seimbang di 3 kelurahan. Terkait dengan ini, tampak bahwa PDI lebih banyak mendapat keuntungan daripada Golkar (Gambar 3).

Beberapa pertimbangan memperlihatkan kecenderungan memilih bekas warga pendukung PPP tersebut lebih tertuju pada PDI. *Pertama*, sejak lama banyak pendukung PPP yang menganggap Golkar sebagai "musuh bebuyutan," sehingga tumbuh rasa enggan dan "gengsi" untuk mendukung Golkar. *Kedua*, kebanyakan warga pendukung PPP berasal dari daerah pinggiran ataupun daerah "kumuh" yang diwarnai oleh kompleksitas masalah sosial-ekonomi. Sifat hubungan masyarakat daerah semacam ini dengan aparat formal, yang bisa diidentikan dengan Golkar, relatif renggang. *Ketiga*, masyarakat dari lingkungan seperti itu cenderung mudah tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan masalah-masalah keadilan, pertentangan kaya-miskin, anti-korupsi dan sebagainya. Karena itu, atas dasar kesetiakawanan sosial yang terbentuk, mereka cenderung melihat pihak yang mapan, yang sebagian besar diwakili oleh Golkar, sebagai "musuh." Mereka melihat dirinya sebagai kelompok masyarakat kecil, miskin, dan tersisih. *Keempat*, kader dan/atau komisaris Golkar relatif menemui banyak kesulitan untuk mendekati dan menggalang warga masyarakat ini karena isu suksesnya pembangunan kurang dirasakan oleh mereka. *Kelima*, situasi PDI sebagai kekuatan sosial-politik yang menampilkan "wajah" baru dengan disertai isu-isu baru yang menarik serta membawakan harapan-harapan baru terasa lebih cocok bagi warga masyarakat ini daripada Golkar.

Secara umum, Golkar memang mengalami kenaikan perolehan suara di seluruh kelurahan di Jakarta. Kenaikan perolehan suara itu mencapai 581.430 suara atau sebesar 6,7%. Tampak bahwa Golkar meraih kemenangan mutlak di daerah-daerah perkantoran. Di luar daerah perkantoran, biasanya Golkar memperoleh kemenangan mutlak di kompleks perumahan Pegawai Negeri dan ABRI. Tempat-tempat pemungutan suara di daerah-daerah lingkungan ini menunjukkan bahwa Golkar sangat dominan dengan rata-rata mampu mengumpulkan suara lebih dari 85%.

Meskipun demikian, Golkar juga mampu membangun daerah-daerah basis di luar daerah lingkungan seperti tersebut di atas, yaitu antara lain di kelurahan-kelurahan Kartini, Bendungan Hilir, Pademangan Timur, Pluit, Sunter, Marunda, Rorotan, Kepulauan Seribu, Kalideres, Grogol, Jelambar, Kedoya, Cikoko, Lebak Bulus, Setiabudi dan Menteng. Keberhasilan Golkar membangun daerah-daerah basis baru ini tampaknya bukan terutama disebabkan oleh beralihnya suara pendukung PPP, melainkan oleh persiapan yang telah dilakukan oleh Golkar sendiri. Menjelang Pemilu, Golkar DKI secara kontinyu dan intens melaksanakan konsolidasi. Usaha ini tampaknya telah berhasil membentuk puluhan ribu kader dari pelbagai kualifikasi teritorial dan fungsional, bahkan juga telah berhasil dalam menata organisasi dan keanggotaannya secara rapih. Tercatat bahwa anggota resmi Golkar telah mencapai ± 1 juta orang di DKI Jakarta yang berasal dari pelbagai komponen. Secara demikian, penambahan suara sebanyak 581.430 suara tampaknya adalah penambahan murni, bukan pemilih yang asal pilih ataupun pemilih yang salah coblos.

Analisa perolehan suara PDI dalam Pemilu 1987 juga menunjukkan kecenderungan melimpahnya massa PPP ke PDI. Secara keseluruhan PDI menikmati kenaikan jumlah perolehan suara sebesar 622.855, yang masing-masing berasal dari Jakarta Pusat 102.476, Jakarta Utara 109.457, Jakarta Barat 149.380, Jakarta Selatan 130.468 dan Jakarta Timur 131.074. Pengamatan secara lebih khusus menunjukkan bahwa penyumbang suara terbesar bagi kenaikan perolehan suara PDI di masing-masing kelurahan berasal dari kelurahan-kelurahan bekas basis PPP, bahkan basis tradisional PPP seperti Koja Utara, Koja Selatan, Lagoa, Kebon Kosong, Serdang, Kwitang, Kramat, Paseban, Guntur, Tanah Tinggi, Kebon Kacang, Keagungan, Cilandak, Cipinang Besar, dan Rawaterate. Jumlah kelurahan ini adalah 44 buah.

PDI memang belum mampu membangun daerah basis, namun di antara 44 kelurahan itu PDI berhasil membangun daerah kemenangan sebanyak 20 kelurahan (lihat Tabel 4). Di daerah-daerah tersebut, khususnya daerah basis tradisional, sikap politik masyarakatnya tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari masalah-masalah agama yang dianut mereka. Karena itu, apabila kecenderungan mereka dalam menentukan pilihan pada Pemilu 1987 adalah kepada PDI, hal itu berarti bahwa masalah-masalah agama tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Secara faktual PDI hampir tidak pernah menyatakan diri baik tersurat ataupun tersirat sebagai kekuatan sosial-politik yang mengaspirasikan pandangan-pandangan politik agama tertentu. Sekiranya perubahan ini dilatarbelakangi oleh kemajuan kesadaran politik, bukan sekedar emosional, hal ini jelas akan membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

GENERASI MUDA

Kampanye PDI dalam Pemilu 1987 memang banyak diikuti oleh orang-orang muda. Namun apakah hal itu berarti dukungan orang-orang muda yang ikut kampanye tersebut diberikan kepada PDI dalam pemungutan suara, merupakan masalah lain yang perlu diamati secara lebih teliti. Kalau yang dimaksud dengan orang-orang muda atau generasi muda adalah pemilih yang berusia di bawah 40 tahun, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami perang kemerdekaan, yang sebagian berkembang dewasa pada masa Orde Lama dan yang sebagian yang lain berkembang dewasa pada masa Orde Baru. Meskipun demikian, di antara mereka terdapat orang-orang yang pernah 3 kali, 2 kali dan 1 kali mengikuti pemilihan umum.

Sementara itu sebagian yang lain baru menggunakan hak memilihnya untuk yang pertama kali pada Pemilu 1987. Jumlah pemilih muda ini adalah 70% dari 4,4 juta pemilih (± 3 juta orang). Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Daerah (PPD) DKI Jakarta tercatat pemilih baru dalam Pemilu 1987 sebanyak 971.000 orang, yang terdiri dari 85% (800.000 orang) pemilih baru (pemula) dan 15% (171.000 orang) penduduk baru DKI (pendatang). Bagaimanakah sikap memilih mereka? Jika 800.000 pemilih baru terbagi rata di antara ketiga OPP maka masing-masing OPP sekurang-kurangnya memperoleh tambahan suara ± 266.500 suara. Kenyataan membuktikan bahwa PPP justru mengalami penurunan dalam perolehan suaranya sebanyak 384.763 suara.

Data dari Panitia Pemilihan Daerah DKI Jakarta juga mencatat bahwa 60% dari pemilih pemula adalah pelajar Sekolah Lanjutan Atas (SLA) yang berjumlah ± 300.000 orang dan mahasiswa yang berjumlah ± 180.000 orang. 40% atau 320.000 orang sisanya adalah orang-orang muda yang telah bekerja dan yang belum bekerja. Pada setiap putaran kampanye PDI memang tampak banyak sekali dukungan yang berasal dari siswa-siswa sekolah SLA tersebut, sehingga diperkirakan PDI akan mendominasi pengumpulan suara dari orang-orang muda ini. Namun bila dilihat hasil-hasil pemungutan suara di TPS-TPS masing-masing SLA di Jakarta, perkiraan awal tersebut di atas menjadi kurang tepat. Di seluruh SLA yang ada di DKI ternyata Golkar sangat unggul dalam perolehan suara, yakni dengan meraih persentase perolehan suara di atas angka 80%. Bahkan di SLA-SLA tertentu yang menjadi "posko" kampanye PDI pun, Golkar juga mencatat kemenangan. Dominasi perolehan suara Golkar ini hampir merata di SLA Negeri, Swasta Umum, Kristen, Katholik dan Islam. Hanya di satu sekolah SLA Muhammadiyah, PPP justru dapat melampaui perolehan suara Golkar. Dari 201 TPS SLA dengan pemilih berjumlah 102.402 orang, Golkar memperoleh suara sebanyak 82.406 atau 80,4%, PDI berhasil menarik suara sebesar 12.224 atau 11,9% dan PPP merangkum suara sebanyak 7.772 atau 7,5% (lihat Tabel 5).

Tabel 5

DATA PEROLEHAN SUARA PEMILU 1987
TPS SEKOLAH*
(Dipilih 201 TPS Secara Random)

Jenis SLA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara						
			PPP		GOLKAR		PDI		
			N	%	N	%	N	%	
SLA Negeri	138	77.686	5.464	7,04	64.476	83,00	7.746	9,96	
SLA Swasta	Umum	44	19.071	2.028	10,63	13.583	71,22	3.460	18,15
	Islam	3	.709	.203	28,63	.462	65,16	.44	6,21
	Kristen	16	4.936	.77	1,56	3.885	78,74	.974	19,70
Total	201	102.402	7.772	7,59	82.406	80,47	12.224	11,94	

Catatan: *Diolah berdasarkan pada hasil Analisa pengamatan lapangan.

Pengamatan yang lebih rinci pada TPS-TPS Perguruan Tinggi sulit dilakukan karena pada hari pemungutan suara itu hampir semua Perguruan Tinggi di Jakarta libur. Namun bila dianggap bahwa suara mahasiswa terbagi rata di antara ketiga OPP, maka Golkar, PDI maupun PPP memperoleh dukungan suara masing-masing sebesar 180.000 suara. Demikian pula halnya dengan pemilih-pemilih muda non-pelajar dan non-mahasiswa. Masing-masing OPP bisa memperoleh dukungan suara sebesar ($\frac{1}{3} \times 320.000$) ± 106.600 suara. Dengan demikian, perkiraan dukungan suara yang diperoleh Golkar dari pemilih muda dengan karakteristik khusus ini adalah 406.600 suara, PDI memperoleh dukungan sebanyak 202.300 suara dan PPP mendapat dukungan sebesar 189.100 suara.

Bila diasumsikan PPP samasekali tidak memperoleh dukungan dari pemilih muda ini, maka dukungan yang diperoleh PDI adalah sebesar (800.000-406.600) 393.400 suara. Dengan perkiraan ini, tampaknya sebagian besar dari pemilih muda tersebut cenderung menentukan pilihannya kepada Golkar, meskipun secara kuantitatif jumlah dukungan kepada Golkar dan kepada PDI kira-kira berimbang. Tetapi berdasarkan kenyataan dalam proses kampanye, generasi muda pendukung PDI tampak lebih "vokal," lebih atraktif dan lebih mudah dikenali daripada generasi muda pendukung Golkar.

Sikap memilih generasi muda yang cenderung kepada Golkar mungkin sangat dipengaruhi oleh beberapa situasi tertentu. Dalam kaitan ini terlihat bahwa generasi muda cukup kritis dalam memanfaatkan suasana; dalam arti bahwa OPP yang memberikan suasana "enak" diikuti kampanyenya, sementara OPP yang memberikan kemungkinan lebih besar untuk pemenuhan kepentingan mereka di masa depan diberikan dukungan suara. Dengan kata

lain, mungkin generasi muda ini cukup kritis dalam melihat realitas yang terjadi. Mereka dapat mengukur kemungkinan-kemungkinan realisasi janji-janji Pemilu masing-masing OPP.

Situasi tersebut tidak berarti bahwa generasi muda itu bebas dari tekanan-tekanan lingkungan. Mungkin saja masing-masing OPP dapat secara efektif memanfaatkan "masa tenang" Pemilu untuk mempengaruhi sikap memilih generasi muda ini. Lagipula, tampaknya pengaruh orangtua sangat besar terhadap penentuan sikap memilih generasi muda. Namun terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, sikap politik generasi muda yang cenderung dekat kepada Golkar dan PDI telah memberikan prospek yang lebih cerah dalam kehidupan politik di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

PENUTUP

Jakarta Raya sebagai ibukota negara Republik Indonesia telah menunjukkan adanya kehidupan warganya secara dinamis. Hal ini terlihat pada perubahan peta politik Jakarta seturut dengan perkembangan zaman yang berlaku. Perubahan peta politik ini memang dapat memberi gambaran secara umum tentang pola berpikir dan sikap politik di kalangan masyarakat yang bersangkutan.

Namun apakah telah terjadi suatu perubahan dalam pola dan sikap politik masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan sosial peserta Pemilu khususnya, dan terhadap kehidupan politik nasional umumnya, masih tetap merupakan suatu pertanyaan besar. Bukan tidak mungkin perubahan-perubahan itu justru terjadi pada kekuatan-kekuatan sosial-politik tersebut, sementara pola dan sikap politik masyarakatnya tetap. Kemungkinan semacam ini dapat dilihat dari perkembangan kondisi internal baik yang dialami oleh PPP, PDI maupun Golkar.

Terlepas dari itu semua, secara keseluruhan proses kampanye Pemilu di Jakarta berjalan dengan relatif aman, tertib dan terbuka. Hasil-hasil Pemilu 1987 di Jakarta juga menunjukkan adanya dukungan masyarakat yang kira-kira berimbang terhadap masing-masing OPP, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membuka kemungkinan-kemungkinan yang lebih maju dalam kehidupan politik nasional di masa-masa yang akan datang.

Peran ABRI yang terbuka dan adil terhadap masyarakat yang memang tampak jelas selama pelaksanaan proses Pemilu 1987 di Jakarta telah ikut pula menciptakan perkembangan suasana keterbukaan di kalangan masyarakat. Hal ini jelas berpengaruh atas perkembangan pembangunan politik yang sehat dan kuat. Apalagi bila keadaan seperti itu dikaitkan dengan soal ideologi

Pancasila, yang pada masa-masa yang lalu selalu menjadi perhatian khusus bagi ABRI. Karena itu, peran ABRI untuk mendukung terus pembangunan politik tidak hanya pada masyarakat DKI Jakarta saja tetapi juga dalam konteks pembangunan politik yang lebih luas kiranya akan sangat menentukan kelangsungan pembangunan politik itu sendiri.

Suasana yang ditumbuhkan oleh ABRI itu juga secara langsung seiring dengan suasana umum yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat dari isu-isu tema kampanye yang mendapat tanggapan dari sebagian besar masyarakat Jakarta, yang berkisar pada masalah-masalah sosial-ekonomi dan sosial-politik. Meskipun ada upaya untuk membangkitkan kembali isu agama yang cenderung bersifat ideologis, isu ini tidak berkembang karena tidak adanya tanggapan dari masyarakat. Mungkin faktor utama yang mendukung perkembangan suasana semacam ini adalah konsistennya masing-masing OPP atas penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Secara langsung ataupun tidak langsung, hal tersebut berpengaruh pada semakin mudarnya pertimbangan-pertimbangan tradisional-primordialistis dalam menentukan sikap-sikap politik pada sebagian besar masyarakat Jakarta. Secara demikian, pada dasarnya suasana semacam ini memberikan kemungkinan dan kesempatan yang sama bagi masing-masing OPP untuk mengembangkan diri berdasarkan kebangsaan yang lebih bersifat rasional.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, PDI dengan demikian mempunyai kesempatan untuk meningkatkan perannya di masa-masa mendatang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh Golkar dan PPP. Terutama apabila PDI mampu mengadakan konsolidasi organisasi sehingga dengan orientasi nasionalismenya yang sehat ia dapat membangun akar-akar pendukung sampai pada lapis masyarakat terbawah, apalagi bila didukung oleh program yang konkret dan mengena pada kepentingan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya yang telah menunjukkan kecenderungan memberikan dukungan kepada PDI.

Demikian pula, PPP secara langsung didorong untuk semakin menampilkan citranya tidak saja sebagai kekuatan yang hanya menyalurkan aspirasi agama tetapi terutama sebagai kekuatan sosial-politik yang terbuka dan berorientasi pada upaya pembangunan bangsa. Pada kampanye yang baru lalu itu terbukti bahwa isu agama saja tidak mampu menarik perhatian, apalagi dukungan dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, PPP tampaknya dituntut untuk bekerja lebih keras dalam membangun dirinya sebagai kekuatan sosial-politik yang bisa dipercaya oleh masyarakat banyak pada umumnya. Upaya-upaya konsolidasi mungkin perlu dilakukan tidak saja menyangkut bidang personalia tetapi juga dalam mengelola kembali hubungannya dengan massa pendukungnya.

Meskipun Golkar mampu memperoleh kemenangan di Jakarta, hal itu tidak berarti bahwa tantangan yang dihadapinya semakin berkurang. Justru sebaliknya, tantangan yang dimunculkan oleh kebangkitan PDI dan tanggapan orang-orang muda terhadap tema-tema kampanye PDI baik langsung ataupun tidak langsung menjadi persoalan yang harus dijawab oleh Golkar. Karena itu, jika ingin mempertahankan kedudukannya sebagai kekuatan sosial-politik yang terbesar di Jakarta, maka Golkar tidak bisa sekedar menjadi kekuatan yang konservatif dan reaksioner. Ia harus tumbuh sebagai kekuatan pemacu pembangunan yang dinamis dan kreatif. Untuk itu, peningkatan kualitas baik organisasi maupun personalia harus selalu menjadi perhatian di dalam upaya mengembangkan peran politiknya di masa-masa yang akan datang.